

## **Menavigasi Labirin Politik Kontemporer: Analisis Komparatif Teori Politik Pada Agama Islam dan Kristen**

**Fatimah Nurul Rosyidah**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [fatimahnurulr08@gmail.com](mailto:fatimahnurulr08@gmail.com)

**Azka Ibadil Hakim**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [azkaib57@gmail.com](mailto:azkaib57@gmail.com)

**Bahauddin**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [bahauddin1610@gmail.com](mailto:bahauddin1610@gmail.com)

**Nayshilla Dea Shinta**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [nayshilladeashinta005@gmail.com](mailto:nayshilladeashinta005@gmail.com)

**Salsabila Nuraulia Putri**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [salsabilanurauliaputri115@gmail.com](mailto:salsabilanurauliaputri115@gmail.com)

**Siti Isnaini Ramadani**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

e-mail: [Isnaini.rmdni@gmail.com](mailto:Isnaini.rmdni@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines the political relationship between Islam and Christianity in the context of contemporary politics, focusing on the political theories of both religions. The background of this research lies in the complexity of the relationship between religion and politics, which has become increasingly relevant in the era of globalization, where Islam and Christianity play significant roles in global political dynamics. The study employs a qualitative method based on a literature review from various credible sources, such as books, scholarly articles, and expert works. Data analysis is conducted through the categorization of key themes, including the role of religion in the public sphere, the relationship between religion and the state, and efforts to foster interfaith dialogue. The findings reveal that Islamic political theory emphasizes values of justice, consultation, and welfare, while Christian political theory focuses more on integrating moral values into public policies. Despite differing approaches, both traditions hold the potential to promote interfaith dialogue and tolerance. A comparison of Islamic and Christian political theories highlights opportunities to create harmony through the application of concepts such as inclusivism and tolerance in social and political interactions. This research provides a significant contribution to the study of the relationship between religion and politics and supports the creation of inclusive dialogue amid cultural and religious diversity.*

**Keywords:** *Islamic Political Theory; Christian Political Theory; Interfaith Dialogue; Tolerance and Inclusivism; Contemporary Politics*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji hubungan politik antara Islam dan Kristen dalam konteks politik kontemporer, dengan fokus pada teori politik kedua agama tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah kompleksitas hubungan antara agama dan politik yang semakin relevan di era globalisasi, di mana Islam dan Kristen memainkan peran penting dalam dinamika politik global. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis kajian literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, artikel ilmiah, dan karya ahli. Analisis data dilakukan melalui kategorisasi tema-tema utama, seperti peran agama dalam ruang publik, hubungan agama dengan negara, dan upaya membangun dialog antaragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori politik Islam menekankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan, sementara teori politik Kristen lebih fokus pada integrasi nilai-nilai moral ke dalam kebijakan

publik. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kedua tradisi ini memiliki potensi untuk mendorong dialog dan toleransi antaragama. Perbandingan teori politik Islam dan Kristen mengungkap peluang untuk menciptakan harmoni melalui penerapan konsep-konsep seperti inklusivisme dan toleransi dalam interaksi sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian hubungan agama dan politik, serta mendukung terciptanya dialog yang inklusif di tengah keragaman budaya dan agama.

**Kata kunci:** *Teori Politik Islam; Teori Politik Kristen; Dialog Antaragama; Toleransi dan Inklusivisme; Politik Kontemporer*

## Pendahuluan

Sejak awal peradaban manusia, politik dan agama selalu berkaitan, saling memengaruhi dan membentuk satu sama lainnya. Era globalisasi membawa dimensi baru dalam kompleksitas politik kontemporer, memperkuat interaksi antara keduanya. Islam dan Kristen, merupakan dua agama dengan pengikut terbanyak di dunia, dalam konteks politik kontemporer. Dunia politik kontemporer bagaikan labirin yang kompleks dan penuh tantangan. Di tengah pergolakan ideologi, perebutan kekuasaan, dan isu-isu global yang kompleks, menemukan jalan keluar yang tepat menjadi semakin sulit. Dalam labirin ini, dua agama besar dunia, Islam dan Kristen, menawarkan perspektif dan nilai-nilai politik yang kaya dan beragam (Alkaf, 2018). Islam, dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut, merupakan agama terbesar ke-2 di dunia dan memiliki pengaruh signifikan pada politik di negara-negara mayoritas Muslim. Kristen, dengan lebih dari 2,4 miliar pengikut, juga memiliki pengaruh signifikan pada politik di banyak negara di dunia, termasuk di negara-negara Barat (Mujani, 2007).

Teori politik Islam memiliki seperangkat ide dan konsep yang berusaha menjelaskan hubungan antara agama Islam dan politik. Teori ini didasarkan pada teks-teks suci Islam, seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, serta tradisi intelektual Islam yang kaya. Teori politik Islam telah diterapkan dalam berbagai cara sepanjang sejarah, seperti dalam Kekhalifahan Umayyah dan Kesultanan Utsmaniyah (Duryat, 2021). Meskipun telah berkembang selama berabad-abad, teori politik Islam masih memiliki relevansi di era modern. Nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan yang ditekankan dalam teori politik Islam masih dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern.

Teori politik Islam dapat mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi politik dengan menekankan pentingnya musyawarah (syura) dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Konsep syura selaras dengan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang mereka inginkan. Banyak negara Muslim modern menerapkan sistem demokrasi dengan berbagai variasi, dan beberapa negara Muslim bahkan memiliki konstitusi yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (Zamri, 2020). Pemahaman yang lebih baik tentang teori politik Islam dapat membantu membangun dialog antaragama dan toleransi di tengah keragaman budaya dan agama. Teori politik Islam menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan tradisi orang lain, serta hidup berdampingan secara damai.

Dialog antaragama yang didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat dapat membantu mencegah konflik dan membangun masyarakat yang lebih toleran.

Teori politik kristen merupakan suatu kerangka pemikiran yang kompleks dan dinamis yang berusaha menjelaskan hubungan antara agama Kristen dan politik. Berakar dari teks-teks suci Kristen, Alkitab, dan tradisi intelektual yang kaya, teori ini menawarkan perspektif unik tentang tata kelola dan pemerintahan (Lefebure, 2003). Perkembangan teori politik Kristen terjalin erat dengan sejarah panjang Kekristenan. Era awal Kekristenan ditandai dengan pemikiran para pemikir seperti Agustinus dan Thomas Aquinas, yang mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara iman dan pemerintahan. Abad Pertengahan melihat Gereja Katolik memainkan peran penting dalam politik Eropa, dengan Paus sebagai pemimpin spiritual dan politik tertinggi. Reformasi Protestan membawa perubahan signifikan dalam teori politik Kristen, dengan penekanan pada otoritas Alkitab dan peran individu dalam interpretasinya. Era modern menyaksikan evolusi teori politik Kristen dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi (Dewi, 2023).

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis referensi untuk menganalisis teori politik Islam dan Kristen dalam konteks politik kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara agama dan politik. Penelitian dimulai dengan merumuskan fokus utama, yaitu hubungan antara politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global. Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini meliputi bagaimana hubungan antara politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global, bagaimana teori politik Islam dan Kristen memandang peran agama dalam ruang publik dan hubungannya dengan negara, serta bagaimana perbandingan teori politik Islam dan Kristen dapat membantu membangun dialog antaragama dan toleransi di tengah keragaman budaya dan politik.

Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber referensi yang terpercaya, seperti buku-buku yang membahas teori politik Islam dan Kristen, artikel ilmiah dari jurnal-jurnal bereputasi di bidang politik dan agama, serta karya tulis dari para ahli yang berkompeten di bidang ini. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data dianalisis melalui proses kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti peran agama dalam ruang publik, hubungan agama dengan negara, dan upaya membangun dialog antaragama. Selanjutnya, data dikontekstualisasikan dengan mengaitkan informasi yang diperoleh dengan konteks politik kontemporer untuk memahami relevansi teori politik Islam dan Kristen dalam dinamika politik global. Proses ini diakhiri dengan interpretasi data untuk menjelaskan fenomena politik yang sedang diteliti.

Hasil analisis data disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang mendalam, dengan fokus pada kompleksitas hubungan antara politik Islam dan Kristen, pandangan teori politik Islam dan Kristen terhadap peran agama di ruang publik, serta potensi dialog antaragama untuk mendorong toleransi dalam keragaman budaya dan politik. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan yang diperoleh, dan implikasi penelitian bagi pengembangan teori politik serta praktik hubungan antaragama diuraikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kajian

politik kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang signifikan mengenai hubungan antara agama dan politik, serta mendukung terciptanya dialog dan toleransi di tengah keberagaman.

## **Pembahasan**

### **Hubungan Politik Islam Dan Kristen Dalam Konteks Politik Global**

Hubungan antara politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global telah lama menjadi subjek perdebatan dan analisis. Perspektif yang berbeda-beda telah dikemukakan oleh para ahli dan analis, dengan beberapa memandangnya sebagai konfrontasi antarperadaban dan lainnya sebagai dialog dan kerjasama. Dalam konteks sejarah, persaingan hegemoni politik dan ekonomi antara Kekaisaran Arab-Islam dan dunia Kristen Abad Pertengahan telah diinterpretasikan sebagai sebuah konfrontasi antarperadaban yang menyebabkan kesadaran Barat memahami Islam sebagai lawan atau musuh. Prasangka-prasangka yang diciptakan oleh konfrontasi Islam dan Kristen di Spanyol dalam perang Salib atau perang melawan Turki merasuki kesadaran Barat secara mendalam, sehingga terbentuk "kesalahan penafsiran sejarah" yang membedakan Kristen dan Yudaisme dengan Islam (Amin, 2016). Namun, beberapa analisis juga menunjukkan bahwa hubungan antara peradaban Barat-Kristen dan Timur-Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase, dengan fase pertama menunjukkan kontribusi kebudayaan Islam bagi peradaban Barat yang tidak banyak diperhitungkan oleh sejarawan Barat. Fase kedua melibatkan invasi militer oleh Perancis terhadap wilayah teritorial Mesir pada akhir abad ke-18, sementara fase ketiga menunjukkan adanya pengaruh saling membutuhkan antara kedua peradaban dalam kerjasama global dan liberal.

Dalam konteks modern, beberapa analisis memperlihatkan bahwa Islam dan Kristen memiliki tujuan kesatuan universal yang berbeda. Nasionalisme Islam, misalnya, dianggap sebagai alat pemersatu dan perjuangan untuk merebut kemerdekaan, sedangkan nasionalisme sekuler dianggap sebagai alat pemisahan antara agama dan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks demokrasi, beberapa analisis menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, seperti pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang. Namun, realitas empirik demokrasi di negara-negara Muslim masih menjadi subjek perdebatan, dengan beberapa mempertanyakan apakah realitas empirik masyarakat Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Dalam sintesis, hubungan antara politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global dapat dilihat sebagai kompleks dan dinamis, dengan perspektif yang berbeda-beda dan analisis yang terus berkembang (Mugiyono, 2014).

Hubungan politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global menjadi topik perbincangan yang sangat relevan dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa seperti tragedi 11 September 2001 telah memusatkan perhatian pada Islam sebagai kekuatan penting dalam politik global. Namun, Kekhawatiran ini sering disalahkan dengan ketakutan akan terorisme dan ekstremisme, khususnya di negara-negara Barat. Dijelaskan oleh Wicaksono dan Syamsuddin (2012; 2013) bahwasanya hubungan antara agama dan negara atau antara politik dan agama telah menjadi bahan

perdebatan yang panjang dan meluas di kalangan ulama, bahkan di kalangan fundamentalis agama Islam dan Kristen.

Terdapat pula beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara politik Islam dan Kristen ini, salah satu persamaannya adalah keduanya mempunyai konsep keagamaan tentang negara dan partai. Namun perbedaan utamanya terletak di bagaimana mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam politik. Politik Islam, seperti yang dijelaskan oleh Wicaksono (2013) yang mengemukakan bahwa politik Islam mengintegrasikan kedalam politik ajaran Islam yang penuh dengan moral, spiritual, dan intelektual. Sebaliknya dengan politik Kristen, menurut Soleh (2005), politik Kristen ini memiliki sejarah yang kompleks dengan berbagai struktur politik di masa lalu, sementara untuk politik Islam sendiri di beberapa negara Islam tidak memiliki mekanisme politik demokratis.

### **Politik Islam Dan Kristen Memandang Peran Agama Dalam Ruang Publik Dan Keterkaitan Dengan Negara**

Teori politik Islam dan Kristen mempunyai padangan berbeda masing-masing mengenai peran agama di ruang publik dan memiliki hubungannya dengan negara. Berikut merupakan penjelasan mengenai bagaimana teori politik Islam dan Kristen memandang peran agama di ruang publik dan hubungannya dengan negara.

#### **Teori Politik Islam**

Dalam teori politik Islam, agama memegang peranan yang sangat penting dalam ruang publik dan dalam hubungannya dengan negara. Islam sebagai agama yang berdasarkan ajaran Tuhan, mempunyai prinsip-prinsip demokrasi dan unsur-unsur yang berkaitan dengan konsep-konsep seperti *as-syura*, *al-‘ilah*, *al-amanah*, *al-masuliyah* dan *al-hurriyyah*. Dalam Islam, demokrasi tidak hanya fokus pada proses pemilu, namun juga pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas yang melekat dalam ajaran Islam. Dijelaskan dalam sejarah Islam, demokrasi dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw dan khulafaurrasyidin. Namun, sebagian besar negara-negara Muslim kemudian gagal mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim saja, tetapi terjadi juga di negara-negara non Muslim (Barat). Hal ini adalah bentuk masalah yang dihadapi oleh banyak negara.

Lalu jika dilihat dari konteks modern, teori politik Islam berpendapat bahwa agama harus dikecualikan dari diskusi publik dan dipahami sebagai masalah pribadi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Agama tidak lebih dari sekedar urutan ritual yang menggambarkan ketergantungan manusia pada Tuhannya. Namun, dalam beberapa kasus, agama juga dianggap sebagai alat legitimasi politik, seperti kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dituduh menghina kitab suci agama, dan lainnya.

Selain itu dalam Islam sendiri, agama digunakan sebagai cara untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, dengan meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup mereka pada umumnya, dan untuk meningkatkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara. Partai Islam sendiri dianggap sebagai bagian dari artikulasi atau perjuangan aspirasi umat Islam (Abdillah, 2013). Namun, partai Islam tidak membenarkan melakukan “politisasi agama” yang menggunakan sentimen atau legitimasi agama untuk

memperkuat kepentingan politik seseorang atau suatu kelompok tertentu dan mendiskreditkan orang atau kelompok lain dalam hal-hal yang sebenarnya tak ada hubungan secara langsung dengan agama atau hal-hal yang tidak berdasarkan dalil *qath'i* (absolut).

Adapula tantangan yang terjadi dalam dunia politik Islam ini, seperti radikalisme dan terorisme yang dilakukan atas nama agama Islam telah menjadi permasalahan global yang memerlukan perhatian dan tindakan pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi ekstremisme ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, seperti penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam berdasarkan kegiatan keagamaan masyarakat (Dahlan, 2022). Selain itu HAM atau hak asasi manusia pun masih menjadi bahan perdebatan. Menurut Nasution (2017), beberapa ulama Islam telah mengembangkan wacana mengenai hak asasi manusia dan mengemukakan berbagai pendapat, seperti hak asasi manusia yang bersifat universal berdasarkan pengalaman masyarakat Barat (hak asasi manusia liberal) dapat melemahkan kedaulatan negara dan masyarakat kesucian agama di wilayah lain di dunia ini.

### **Teori Politik Kristen**

Dari perspektif teori politik Kristen, pandangan mengenai agama dalam ruang publik dan hubungannya dengan negara secara global sangatlah kompleks. Dalam Kristen ini memandang agama sebagai aspek yang tidak terbatas pada ritual dan kepentingan pribadi saja, tetapi juga mempunyai arti penting dalam ranah sosial-politik. Jika dilihat dari konteks global, umat Kristiani seringkali memandang agama sebagai landasan moral yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan politik untuk menciptakan keadilan dan perdamaian internasional. Selain itu, dalam beberapa kasus, agama Kristen juga dianggap sebagai alat legitimasi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan hubungan antar negara di tingkat global. Selain itu mempunyai peranan strategis dalam membangun dan memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan disiplin sosial. Negara menggunakan agama Kristen sebagai legitimasi dogmatis untuk mengikat warga negara dalam mematuhi peraturan yang ada. Namun di era sekarang ini, agama Kristen juga harus beradaptasi dengan pemikiran generasi milenial yang mengenal istilah *post-truth*, istilah tersebut membiarkan konsep nalar yang tidak selalu benar, yang terpenting dapat memuaskan apa yang diyakini (Walean, 2021). Dimana dari era *post-truth* dan disrupsi, agama Kristen harus menampilkan keunikan dan relevansi dalam menjaga dan membangun keutuhan relasi-relasi dalam masyarakat. Kritik sosial terhadap agama Kristen menunjukkan bahwa agama Kristen harus berada pada rel doktrin yang relevan dan memegang kepercayaan agama dengan filosofi “claim of truth” tanpa memperlakukan dogma agama lain.

Dalam teori politik Islam dan Kristen, agama memainkan peranan penting dalam ruang publik dan hubungannya dengan negara. Dimana Islam sendiri menganggap agama sebagai bagian dari ajaran Tuhan yang dikaitkan dengan konsep demokrasi. Sementara itu,, umat Kristiani memandang agama sebagai elemen wacana publik yang perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan politik. Namun, dalam konteks modern, teori politik Islam dan Kristen juga berpendapat bahwa agama harus dikecualikan dari diskusi publik dan dipahami sebagai urusan pribadi, hanya mementingkan kepentingan masing-masing individu.

## Perbandingan Teori Politik Islam Dan Kristen

Selanjutnya terdapat pembahasan seputar perbandingan teori politik Islam dan Kristen yang dapat membantu membangun dialog antara agama dan toleransi dalam keragaman budaya dan politik dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkait dengan ajaran-ajaran agama tersebut. Perbandingan pertama terdapat dalam penggunaan konsep "I", "You", dan "We" dalam dialog Islam dan Kristen. Konsep "I", "You", dan "We" digunakan untuk memahami dan mengkomunikasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. "I" menunjukkan eksklusivisme, "You" menunjukkan inklusivisme, dan "We" menunjukkan keterbukaan. Dengan memahami dan menggunakan konsep ini, dialog antara agama dapat lebih efektif dalam mencapai toleransi dan keberagaman. Konsep dari poin ini memiliki tujuan yang spesifik dan berbeda-beda. "I" digunakan untuk mengekspresikan pandangan pribadi dan pengalaman pribadi, seperti yang dijelaskan dalam buku "*Dialog antara Muslim dan Kristen*" oleh Dr. Hasan Ba'qiel. "You" digunakan untuk mengarahkan perhatian dan menunjukkan solidaritas, seperti dalam diskusi antara Islam dan Kristen. Dan "We" digunakan untuk menunjukkan kesadran bersama dan kesamaan tujuan, seperti dalam buku "*Etika Dialog Antar Agama (Kristen-Muslim)*" karya R Maurice Boormans (2003).

Perbandingan kedua terdapat pada penggunaan kecenderungan "*Mistis*", "*Prophetic-Ideologis*", dan "*Humanis-Fungsional*" dalam dialog: kecenderungan "*mistis*" dalam Islam dan Kristen dapat membantu memahami keberagaman sebagai suatu pengalaman pribadi dan spiritual, sedangkan kecenderungan "*prophetic-ideologis*" dapat membantu memahami keberagaman sebagai suatu misi sosial dan keagamaan. Kecenderungan "*humanis-fungsional*" dapat membantu memahami keberagaman sebagai suatu bagian dari kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial (Casram, 2016).

Perbandingan ketiga membahas seputar penggunaan eklektisisme dalam Islam dan Kristen. Eklektisisme dalam Islam dan Kristen memiliki tujuan yang berbeda, dalam Islam sendiri eklektisisme digunakan sebagai pendekatan dalam memilih bahan baku hukum nasional yang meliputi seputar hukum Islam, hukum Barat, dan Hukum Adat. Tujuan tersebut untuk mencapai nilai-nilai hukum yang universal dan valid untuk diterima sebagai doktrin positif untuk mempercepat pembentukan hukum nasional Indonesia di masa depan (Yudarwin, 2016). Dalam agama Kristen, eklektisisme tidak berkaitan langsung dengan penggunaan unsur hukum lain dalam sistem hukum Kristen. Namun, dalam sejarahnya, agama Kristen mengadopsi unsur-unsur budaya lain, seperti penggunaan kertas dalam dokumen resmi, yang berbeda dengan praktik Islam sebelumnya.

Perbandingan keempat adanya dialog antar iman dalam Islam dan Kristen dapat membantu memahami keberagaman sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi antara berbagai agama. Islam menekankan dialog untuk memahami dan menghormati agama lain serta memperluas pengetahuan spiritual. Al-Qur'an mewajibkan umat Islam untuk berkomunikasi dengan pemeluk agama lain untuk memahami dan menghormati agamanya (Bahri, 2011). Dalam kristen, dialog antar iman juga dianggap sebagai cara untuk memahami dan menghormati keberagaman lain. Pedoman dialog Kristen-Islam, misalnya ditujukan untuk membantu umat Kristen

dan Islam di Indonesia membangun hubungan yang lebih baik dan memahami keberagaman masing-masing. Dalam dialog antar iman, Islam dan Kristen, menekankan pentingnya memahami dan menghormati keberagaman lain serta memperluas pengetahuan dan pengalaman spiritual.

Perbandingan terakhir terdapat penjelasan mengenai penggunaan toleransi dalam Islam dan Kristen dapat membantu memahami keberagaman sebagai suatu nilai yang penting dalam interaksi antara berbagai agama. Selain itu, untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Toleransi diterapkan dalam berbagai cara, seperti menerima perbedaan, saling menghormati, dan saling mendukung. Dengan demikian, dialog antara agama dapat lebih inklusif dan toleran (Nirwana & Rais, 2019). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam dan Kristen, perbandingan teori politik Islam dan Kristen dapat membantu membangun dialog antara agama dan toleransi dalam keragaman budaya dan politik.

### **Simpulan**

Hubungan politik Islam dan Kristen dalam konteks politik global merupakan topik yang kompleks, dipengaruhi oleh sejarah panjang interaksi, perbedaan teologis, serta tantangan modern. Teori politik Islam menempatkan agama sebagai inti kehidupan masyarakat dan negara, menekankan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas yang berakar pada ajaran Islam. Namun, penerapan nilai-nilai ini sering menghadapi tantangan seperti radikalisme, terorisme, dan perdebatan tentang hak asasi manusia. Di sisi lain, teori politik Kristen memandang agama sebagai landasan moral untuk membangun keadilan dan perdamaian, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Dalam era modern, baik Islam maupun Kristen menghadapi tantangan relevansi nilai-nilai keagamaan di tengah perubahan sosial dan budaya, termasuk era *post-truth* yang menuntut adaptasi pemikiran keagamaan.

Perbandingan antara politik Islam dan Kristen menunjukkan peluang untuk membangun dialog yang inklusif dan toleran. Konsep seperti "I", "You", dan "We" mencerminkan pendekatan terhadap keberagaman, sementara kecenderungan mistis, prophetis-ideologis, dan humanis-fungsional memperkaya interaksi sosial dan spiritual. Dialog antariman dan penerapan toleransi menjadi kunci menciptakan harmoni antarumat beragama, dengan menekankan penghormatan terhadap perbedaan dan kerja sama dalam keberagaman. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang mendalam, kedua tradisi politik ini dapat berkontribusi pada terciptanya harmoni global dan membangun hubungan yang lebih inklusif di tengah kompleksitas politik dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, M. (2013). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Alkaf, M. (2018). Demokrasi Yang Berkeadaban Ahmad Syafii Maarif. *Merawat Kewarasan Publik*, 42.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).



- Bahri, M. Z. (2011). Dialog antar Iman dan Kerja Sama Demi Harmoni Bumi. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, 13(1), 61–96.
- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
- Dahlan, M. Z. (2022). Menangkal Radikalisme Berujung Terorisme Dengan Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Kegiatan Keagamaan Masyarakat. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 6(2), 205–213.
- Dewi, E. (2023). *Pemikiran Filsafat Modern: Aliran dan Perkembangannya Dalam Konteks Kekinian*. Lsama.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Kristen-Muslim, P. D., & Borrmans, R. M. (2003). *Etika Dialog Antar Agama*.
- Lefebure, L. D. (2003). *Penyataan Allah, Agama dan Kekerasan*. BPK Gunung Mulia.
- Mugiyono, M. (2014). Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 15(2), 97–115.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, M. (2017). Pendidikan HAM dalam Konteks Islam dan Keindonesiaan; HAM yang adil dan beradab. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 219–262.
- Nirwana, A., & Rais, M. (2019). Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Kristen Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 6(02), 185–218.
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126.
- Syamsuddin, M. (2012). Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam. *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 1–22.
- Walean, J. (2021). Agama dan Teologi Kristen di Era Post-Truth dan Disrupsi: Sebuah Kritik Sosiologis. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 3(2), 59–70.
- Wicaksono, A. (2013). Islam Politik dalam Politik Global: Sebuah agenda penelitian dalam Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Politik Profetik*, 1(2).
- Yudarwin, Y. (2016). *Eklektisisme antara hukum Islam dan hukum umum: studi kritis atas gagasan Ahmad Qodry Azizy dalam mewujudkan hukum nasional*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zamri, A. R. (2020). *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*. UIN Raden Intan Lampung.